SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian , Pengurusan, dan Pegelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 202);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Realisasi Desa adalah perbandingan antara realisasi pajak dan retribusi Daerah suatu Desa terhadap realisasi pajak dan retribusi seluruh Desa.
8. Realisasi Kabupaten adalah jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Nilai Bobot Desa adalah realisasi penerimaan setiap desa dibagi total realisasi penerimaan seluruh desa dikali seratus persen.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penetapan besaran;
b. tata cara penyaluran;
c. penggunaan; dan
d. sanksi.

BAB III

PENETAPAN BESARAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah).

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada desa berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dikali alokasi proporsional yang ditetapkan dibagi seratus persen.

(3) Besaran penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp.611.961.000 (enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(4) Besaran penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp.408.039.000 (empat ratus delapan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Besaran penerimaan setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

(1) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua).

(3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2020.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung peningkatan pendapatan desa dan daerah.

(2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, bersifat reguler);
b. penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
c. penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes);
d. penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
e. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
f. penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
g. penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
h. pengembangan sistem informasi desa;
i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga);
j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa);
k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.

(3) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu:
   1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, KUD, UMKM;
   2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
   3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.

b. Sub bidang dukungan penanaman modal yaitu:
   1. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
   2. pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);

c. Sub bidang perdagangan dan perindustrian yaitu:
   1. pemeliharaan pasar desa atau kios milik desa;
   2. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan pasar desa, kios milik desa;
   3. pengembangan industri kecil tingkat desa;
   4. pembentukan, fasilitasi, pelatihan, pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga).

## BAB VI
## SANKSI

### Pasal 6

(1) Bupati menunda penyaluran dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa Tahun 2020 dan laporan realisasi penggunaan APBDesa Tahun 2019 paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa Tahun 2020 dan Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun 2019 paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Apabila desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana bagian dari hasil pajak

daerah dan retribusi daerah tidak akan disalurkan oleh pemerintah daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 N0M0R

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. KECAMATAN SIDIKALANG

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belang Malum | 3.801.000 | 3.781.000 | 7.582.000 |
| 2. | Huta Rakyat | 3.801.000 | 12.034.000 | 15.835.000 |
| 3. | Kalang | 3.801.000 | 5.827.000 | 9.628.000 |
| 4. | Bintang | 3.801.000 | 4.059.000 | 7.860.000 |
| 5. | Kalang Simbara | 3.801.000 | 6.605.000 | 10.406.000 |
| 6. | Bintang Mersada | 3.801.000 | 2.872.000 | 6.673.000 |
| | JUMLAH | 22.806.000 | 35.178.000 | 57.984.000 |

II. KECAMATAN SUMBUL

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pegagan Julu X | 3.801.000 | 2.117.000 | 5.918.000 |
| 2. | Pegagan Julu IX | 3.801.000 | 1.445.000 | 5.246.000 |
| 3. | Pegagan Julu VIII | 3.801.000 | 1.158.000 | 4.959.000 |
| 4. | Pegagan Julu VII | 3.801.000 | 4.622.000 | 8.423.000 |
| 5. | Pegagan Julu VI | 3.801.000 | 2.643.000 | 6.444.000 |
| 6. | Pegagan Julu V | 3.801.000 | 11.940.000 | 15.741.000 |
| 7. | Pegagan Julu IV | 3.801.000 | 2.321.000 | 6.122.000 |
| 8. | Pegagan Julu III | 3.801.000 | 1.779.000 | 5.580.000 |
| 9. | Pegagan Julu II | 3.801.000 | 3.257.000 | 7.058.000 |
| 10. | Tanjung Beringin | 3.801.000 | 1.553.000 | 5.354.000 |
| 11. | Dolok Tolong | 3.801.000 | 2.614.000 | 6.415.000 |
| 12. | Pargambiran | 3.801.000 | 1.449.000 | 5.250.000 |
| 13. | Perjuangan | 3.801.000 | 2.893.000 | 6.694.000 |
| 14. | Kuta Gugung | 3.801.000 | 1.903.000 | 5.704.000 |
| 15. | Sileu-leu Parsaoran | 3.801.000 | 1.617.000 | 5.418.000 |
| 16. | Barisan Nauli | 3.801.000 | 869.000 | 4.670.000 |
| 17. | Pangguruan | 3.801.000 | 1.023.000 | 4.824.000 |
| 18. | Tanjung Beringin I | 3.801.000 | 2.697.000 | 6.498.000 |
| | JUMLAH | 68.418.000 | 47.900.000 | 116.318.000 |

III. KECAMATAN TIGALINGGA

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sumbul Tengah | 3.801.000 | 2.238.000 | 6.039.000 |
| 2. | Ujung Teran | 3.801.000 | 2.799.000 | 6.600.000 |
| 3. | Juma Gerat | 3.801.000 | 2.441.000 | 6.242.000 |
| 4. | Sarintonu | 3.801.000 | 3.373.000 | 7.174.000 |
| 5. | Tigalingga | 3.801.000 | 4.161.000 | 7.962.000 |
| 6. | Palding | 3.801.000 | 4.865.000 | 8.666.000 |
| 7. | Lau Bagot | 3.801.000 | 4.075.000 | 7.876.000 |
| 8. | Bertungen Julu | 3.801.000 | 4.200.000 | 8.001.000 |
| 9. | Lau Molgap | 3.801.000 | 1.136.000 | 4.937.000 |
| 10. | Lau Pakpak | 3.801.000 | 3.354.000 | 7.155.000 |
| 11. | Sukandebi | 3.801.000 | 3.689.000 | 7.490.000 |
| 12. | Lau Mil | 3.801.000 | 3.447.000 | 7.248.000 |
| 13. | Lau Sireme | 3.801.000 | 5.236.000 | 9.037.000 |
| 14. | Palding Jaya Sumbul | 3.801.000 | 4.001.000 | 7.802.000 |
| | JUMLAH | 53.214.000 | 49.015.000 | 102.229.000 |

IV. KECAMATAN TANAH PINEM

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sukadame | 3.801.000 | 1.337.000 | 5.138.000 |
| 2. | Gunung Tua | 3.801.000 | 1.032.000 | 4.833.000 |
| 3. | Harapan | 3.801.000 | 3.322.000 | 7.123.000 |
| 4. | Lau Primbon | 3.801.000 | 1.834.000 | 5.635.000 |
| 5. | Kuta Gamber | 3.801.000 | 1.013.000 | 4.814.000 |
| 6. | Kempawa | 3.801.000 | 1.701.000 | 5.502.000 |
| 7. | Tanah Pinem | 3.801.000 | 2.098.000 | 5.899.000 |
| 8. | Pamah | 3.801.000 | 4.827.000 | 8.628.000 |
| 9. | Kuta Buluh | 3.801.000 | 3.356.000 | 7.157.000 |
| 10. | Pasir Tengah | 3.801.000 | 2.423.000 | 6.224.000 |
| 11. | Renun | 3.801.000 | 1.457.000 | 5.258.000 |
| 12. | Lau Tawar | 3.801.000 | 761.000 | 4.562.000 |
| 13. | Balandua | 3.801.000 | 1.052.000 | 4.853.000 |
| 14. | Mangan Molih | 3.801.000 | 819.000 | 4.620.000 |
| 15. | Liang Jering | 3.801.000 | 1.391.000 | 5.192.000 |
| 16. | Alur Subur | 3.801.000 | 1.100.000 | 4.901.000 |
| 17. | Lau Njuhar I | 3.801.000 | 2.015.000 | 5.816.000 |
| 18. | Pasir Mbelang | 3.801.000 | 713.000 | 4.514.000 |
| 19. | Sinar Pagi | 3.801.000 | 1.467.000 | 5.268.000 |
| | JUMLAH | 72.219.000 | 33.718.000 | 105.937.000 |

V. KECAMATAN SILIMA PUNGGA-PUNGGA

| NO | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Palipi | 3.801.000 | 1.967.000 | 5.768.000 |
| 2. | Longkotan | 3.801.000 | 8.031.000 | 11.832.000 |
| 3. | Bongkaras | 3.801.000 | 1.153.000 | 4.954.000 |
| 4. | Tuntung Batu | 3.801.000 | 683.000 | 4.484.000 |
| 5. | Polling Anak-Anak | 3.801.000 | 2.139.000 | 5.940.000 |
| 6. | Siratah | 3.801.000 | 1.372.000 | 5.173.000 |
| 7. | Urukblin | 3.801.000 | 1.608.000 | 5.409.000 |
| 8. | Siboras | 3.801.000 | 1.794.000 | 5.595.000 |
| 9. | Bonian | 3.801.000 | 1.900.000 | 5.701.000 |
| 10. | Sumbari | 3.801.000 | 2.426.000 | 6.227.000 |
| 11. | Bakal Gajah | 3.801.000 | 2.575.000 | 6.376.000 |
| 12. | Lae Panginuman | 3.801.000 | 2.498.000 | 6.299.000 |
| 13. | Lae Ambat | 3.801.000 | 1.924.000 | 5.725.000 |
| 14. | Lae Rambong | 3.801.000 | 1.136.000 | 4.937.000 |
| 15. | Lae Pangaroan | 3.801.000 | 1.895.000 | 5.696.000 |
| | JUMLAH | 57.015.000 | 33.101.000 | 90.116.000 |

VI. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

| NO | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinampang | 3.801.000 | 1.992.000 | 5.793.000 |
| 2. | Sihorbo | 3.801.000 | 1.322.000 | 5.123.000 |
| 3. | Soban | 3.801.000 | 2.170.000 | 5.971.000 |
| 4. | Adian Nangka | 3.801.000 | 1.972.000 | 5.773.000 |
| 5. | Buntu Raja | 3.801.000 | 679.000 | 4.480.000 |
| 6. | Juma Siulok | 3.801.000 | 913.000 | 4.714.000 |
| 7. | Juma Teguh | 3.801.000 | 2.476.000 | 6.277.000 |
| 8. | Sosorlontung | 3.801.000 | 4.247.000 | 8.048.000 |
| 9. | Hutaimbaru | 3.801.000 | 1.447.000 | 5.248.000 |
| 10. | Jumantuang | 3.801.000 | 3.116.000 | 6.917.000 |
| 11. | Gomit | 3.801.000 | 1.693.000 | 5.494.000 |
| 12. | Adian Gupa | 3.801.000 | 1.309.000 | 5.110.000 |
| 13. | Maju | 3.801.000 | 1.404.000 | 5.205.000 |
| | JUMLAH | 49.413.000 | 24.740.000 | 74.153.000 |

VII. KECAMATAN PARBULUAN

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangun | 3.801.000 | 2.352.000 | 6.153.000 |
| 2. | Lae Hole | 3.801.000 | 2.567.000 | 6.368.000 |
| 3. | Parbuluan IV | 3.801.000 | 1.675.000 | 5.476.000 |
| 4. | Parbuluan III | 3.801.000 | 3.762.000 | 7.563.000 |
| 5. | Parbuluan II | 3.801.000 | 1.061.000 | 4.862.000 |
| 6. | Parbuluan I | 3.801.000 | 2.814.000 | 6.615.000 |
| 7. | Parbuluan V | 3.801.000 | 3.124.000 | 6.925.000 |
| 8. | Parbuluan VI | 3.801.000 | 5.961.000 | 9.762.000 |
| 9. | Lae Hole I | 3.801.000 | 1.421.000 | 5.222.000 |
| 10. | Lae Hole II | 3.801.000 | 1.914.000 | 5.715.000 |
| 11. | Bangun I | 3.801.000 | 1.951.000 | 5.752.000 |
| | JUMLAH | 41.811.000 | 28.602.000 | 70.413.000 |

VIII. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Simanduma | 3.801.000 | 1.244.000 | 5.045.000 |
| 2. | Bandar Huta Usang | 3.801.000 | 2.360.000 | 6.161.000 |
| 3. | Onan Lama | 3.801.000 | 963.000 | 4.764.000 |
| 4. | Lingga Raja | 3.801.000 | 2.248.000 | 6.049.000 |
| 5. | Laksa | 3.801.000 | 684.000 | 4.485.000 |
| 6. | Tanjung Saluksuk | 3.801.000 | 676.000 | 4.477.000 |
| 7. | Bukit Tinggi | 3.801.000 | 907.000 | 4.708.000 |
| 8. | Simartugan | 3.801.000 | 1.363.000 | 5.164.000 |
| 9. | Kuta Usang | 3.801.000 | 678.000 | 4.479.000 |
| 10. | Lingga Raja II | 3.801.000 | 2.448.000 | 6.249.000 |
| 11. | Mbinanga | 3.801.000 | 427.000 | 4.302.000 |
| 12. | Bukit Baru | 3.801.000 | 448.000 | 4.249.000 |
| 13. | Perrik Mbue | 3.801.000 | 709.000 | 4.510.000 |
| | JUMLAH | 49.413.000 | 15.155.000 | 64.642.000 |

IX. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tambahan | 3.801.000 | 2.420.000 | 6.221.000 |
| 2. | Kuta Tengah | 3.801.000 | 3.286.000 | 7.087.000 |
| 3. | Lae Nuaha | 3.801.000 | 3.118.000 | 6.919.000 |
| 4. | Sungai Raya | 3.801.000 | 4.275.000 | 8.076.000 |
| 5. | Gunung Meriah | 3.801.000 | 1.822.000 | 5.623.000 |
| 6. | Silumboyah | 3.801.000 | 3.409.000 | 7.210.000 |
| 7. | Pandan | 3.801.000 | 1.646.000 | 5.447.000 |
| 8. | Tualang | 3.801.000 | 2.448.000 | 6.249.000 |
| 9. | Pangaribuan | 3.801.000 | 949.000 | 4.750.000 |
| 10. | Sigambir-Gambir | 3.801.000 | 2.072.000 | 5.873.000 |
| 11. | Bakal Julu | 3.801.000 | 1.966.000 | 5.767.000 |
| 12. | Sipoltong | 3.801.000 | 3.030.000 | 6.831.000 |
| | JUMLAH | 45.612.000 | 30.441.000 | 76.053.000 |

X. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lae Itam | 3.801.000 | 5.821.000 | 9.622.000 |
| 2. | Lae Luhung | 3.801.000 | 1.630.000 | 5.431.000 |
| 3. | Pardomuan | 3.801.000 | 2.621.000 | 6.422.000 |
| 4. | Lae Markelang | 3.801.000 | 2.094.000 | 5.895.000 |
| 5. | Jambur Indonesia | 3.801.000 | 1.582.000 | 5.383.000 |
| 6. | Simungun | 3.801.000 | 2.137.000 | 5.938.000 |
| 7. | Janji | 3.801.000 | 2.883.000 | 6.684.000 |
| 8. | Sopobutar | 3.801.000 | 1.162.000 | 4.963.000 |
| 9. | Lae Sering | 3.801.000 | 2.220.000 | 6.021.000 |
| 10. | Lae Haporas | 3.801.000 | 1.749.000 | 5.550.000 |
| | JUMLAH | 38.010.000 | 23.899.000 | 61.909.000 |

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sumbul | 3.801.000 | 2.191.000 | 5.992.000 |
| 2. | Kentara | 3.801.000 | 3.616.000 | 7.417.000 |
| 3. | Lae Parira | 3.801.000 | 2.250.000 | 6.051.000 |
| 4. | Bulu Duri | 3.801.000 | 3.602.000 | 7.403.000 |
| 5. | Sempung Polling | 3.801.000 | 4.480.000 | 8.281.000 |
| 6. | Lumban Sihite | 3.801.000 | 2.337.000 | 6.138.000 |
| 7. | Lumban Toruan | 3.801.000 | 944.000 | 4.745.000 |
| 8. | Pandiangan | 3.801.000 | 3.261.000 | 7.062.000 |
| 9. | Kaban Julu | 3.801.000 | 3.558.000 | 7.359.000 |
| | JUMLAH | 34.209.000 | 26.239.000 | 60.448.000 |

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bukit Lau Kersik | 3.801.000 | 57.000 | 3.858.000 |
| 2. | Gunung Sitember | 3.801.000 | 2.721.000 | 6.522.000 |
| 3. | Batu Gungun | 3.801.000 | 3.110.000 | 6.911.000 |
| 4. | Rante Besi | 3.801.000 | 1.734.000 | 5.535.000 |
| 5. | Gundaling | 3.801.000 | 1.479.000 | 5.280.000 |
| 6. | Kendit Liang | 3.801.000 | 1.078.000 | 4.879.000 |
| 7. | Lau Lebah | 3.801.000 | 1.350.000 | 5.151.000 |
| 8. | Tupak Raja | 3.801.000 | 2.040.000 | 5.841.000 |
| | JUMLAH | 30.408.000 | 13.569.000 | 43.977.000 |

XIII. KECAMATAN BERAMPU

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sambaliang | 3.801.000 | 1.291.000 | 5.092.000 |
| 2. | Pasi | 3.801.000 | 1.503.000 | 5.304.000 |
| 3. | Banjar Toba | 3.801.000 | 782.000 | 4.583.000 |
| 4. | Berampu | 3.801.000 | 2.413.000 | 6.214.000 |
| 5. | Karing | 3.801.000 | 3.069.000 | 6.870.000 |
| | JUMLAH | 19.005.000 | 9.058.000 | 28.063.000 |

XIV KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Silalahi II | 3.801.000 | 3.893.000 | 7.694.000 |
| 2. | Silalahi I | 3.801.000 | 5.264.000 | 9.065.000 |
| 3. | Paropo | 3.801.000 | 493.000 | 4.294.000 |
| 4. | Silalahi III | 3.801.000 | 1.898.000 | 5.699.000 |
| 5. | Paropo I | 3.801.000 | 565.000 | 4.366.000 |
| | JUMLAH | 19.005.000 | 12.113.000 | 31.118.000 |

XV KECAMATAN SITINJO

| N0 | DESA | Alokasi Merata (60%) | Alokasi Proporsional (40%) | BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sitinjo | 3.801.000 | 11.012.000 | 14.813.000 |
| 2. | Sitinjo I | 3.801.000 | 3.103.000 | 6.904.000 |
| 3. | Sitinjo II | 3.801.000 | 11.122.000 | 14.923.000 |
| | JUMLAH | 11.403.000 | 25.237.000 | 36.640.000 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 611.961.000 | 407.965.000 | 1.020.000.000 |

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006